

Pengaruh E-Planning dan E-Budgeting Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang

Miranda Yulianti^{1*}, Sandrayati², Kurnia Widya Oktarini³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia.

Email: mirandayulianti3@gmail.com^{1*}, sandradewasaputra@gmail.com², kurnia.widya.oktarini@polsri.ac.id³

Histori Artikel:

Dikirim 31 Juli 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 November 2025; Diterima 15 Januari 2026; Diterbitkan 1 Februari 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Yulianti, M., Sandrayati, S., & Oktarini, K. W. (2026). Pengaruh E-Planning dan E-Budgeting Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 12(1), 488-497. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v12i1.5226>.

Abstrak

E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh E-Planning dan E-Budgeting terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang. Sampel yang digunakan adalah laporan LAKIP pada 27 Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang tahun 2022-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pengumpulan data sekunder dari website resmi pemerintah Kota Palembang. Objek penelitian yaitu OPD Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Planning berpengaruh secara negatif terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan E-Budgeting tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Secara simultan, kedua variabel independen, yaitu E-Planning dan E-Budgeting, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Kata Kunci: E-Planning; E-Budgeting; Akuntabilitas.

Abstract

E-government is the use of information and communication technology in governance to improve effectiveness, efficiency, and accountability. This study aims to determine the effect of E-Planning and E-Budgeting on the performance accountability system in Regional Apparatus Organizations (OPD) in Palembang City. The sample used was the LAKIP report from 27 Regional Apparatus Organizations in Palembang City for the period 2022-2024. The research method used was quantitative with secondary data collection from the official website of the Palembang City government. The research object was the OPD of Palembang City. The results showed that E-Planning negatively affected performance accountability, while E-Budgeting did not. Simultaneously, the two independent variables, namely E-Planning and E-Budgeting, together significantly influenced accountability. The implications of this study emphasize the importance of utilizing information technology in increasing transparency, efficiency, and public participation in regional governance.

Keyword: E-Planning; E-Budgeting; Accountability.

RESEARCH ARTICLE

1. Pendahuluan

Pemerintah yang bersih atau *Good Governance* ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan komponen dasar yang saling berkaitan. Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi merupakan tiga komponen mendasar. Akuntabilitas merupakan salah satu dari tiga komponen yang paling penting dalam manajemen pemerintahan. Menurut Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic. Perwujudan pertanggungjawaban disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Tabel 1. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan kinerja	30	23,64	23,79	24,71
2	Pengukuran kinerja	30	17,19	17,41	18,19
3	Pelaporan Kinerja	15	10,31	10,36	10,98
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,35	17,47	18,13
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,49	69,03	72,01
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	BB

Berdasarkan data evaluasi SAKIP periode 2022-2024 (KemenPANRB, 2024), terdapat permasalahan signifikan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Meskipun nilai keseluruhan mengalami peningkatan dari 68,49 menjadi 72,01 dengan predikat "BB" (Baik), capaian ini masih jauh dari optimal. Permasalahan utama terletak pada komponen pengukuran kinerja yang konsisten rendah, hanya mencapai 60% dari bobot maksimal (18,19 dari 30 poin). Hal ini mengindikasikan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi kinerja internal. Komponen perencanaan kinerja juga bermasalah, meskipun memiliki bobot tertinggi namun hanya mencapai 82% dari potensi maksimal. Dampaknya adalah lemahnya akuntabilitas kinerja secara keseluruhan, di mana instansi belum mampu melakukan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem SAKIP belum berfungsi optimal sebagai instrumen transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik. Penilaian ini mencerminkan adanya tantangan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah daerah. Selain permasalahan akuntabilitas tersebut, Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2024) menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berada dalam kategori rentan atau zona merah dengan skor 60,63 poin. Skor ini turun signifikan sebesar 9,30 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 69,93 poin, yang menandakan risiko tinggi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di berbagai instansi pemerintahan daerah, termasuk OPD di Kota Palembang. Kategori ini menempatkan Sumsel dalam zona merah, jauh dari kategori waspada atau terjaga yang memiliki skor lebih tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengembangkan E-Government yang mencakup beberapa komponen penting, di antaranya E-Planning dan E-Budgeting. Penerapan keduanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi informasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

2. Tinjauan Pustaka

E-Planning didefinisikan sebagai aplikasi yang bertujuan untuk mengefisienkan proses perumusan kebijakan dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah secara daring atau elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, khususnya dalam

RESEARCH ARTICLE

Permendagri No. 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Studi yang dilakukan oleh Andika (2022) mengungkapkan bahwa E-Planning (Perencanaan Elektronik) diciptakan untuk mempermudah proses penyusunan kebijakan serta penyusunan rencana pembangunan daerah secara daring. *E-Budgeting* merupakan program penganggaran yang berfungsi sebagai sistem informasi penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan hasil penelitian Rahman (2022), aplikasi ini dapat diakses secara daring melalui web dan memanfaatkan teknologi informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Gamayuni dan Hendrawaty (2022) mengungkapkan bahwa implementasi *E-Planning* dan *E-Budgeting* memberikan dampak positif pada kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yang menggambarkan seberapa efektif dan efisien penggunaan sumber daya publik. Penelitian Novendri (2024) menunjukkan bahwa *E-Budgeting* tidak terlalu berdampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan *E-Budgeting* berdampak positif pada akuntabilitas dan transparansi keuangan di Kota Surabaya, menurut penelitian Putririnda (2020). Lebih lanjut, penelitian Padmasari (2024) menunjukkan bahwa *E-Budgeting* dan *E-Planning* meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan di Kabupaten Lampung Utara. Hal ini sejalan dengan penelitian Lastri (2019), yang menunjukkan bahwa implementasi *E-Planning* dan *E-Budgeting* berpengaruh positif terhadap kualitas SAKIP. Namun, *E-Planning* tidak memberikan dampak yang nyata terhadap keterbukaan keuangan, menurut penelitian yang dilakukan di Kabupaten Demak oleh Maharani (2020).

Penelitian ini didukung oleh *Stewardship Theory* yang menyatakan bahwa manajer atau pengurus harus mengutamakan kepentingan organisasi, dalam hal ini pemerintah, di atas kepentingan mereka sendiri. Menerapkan *E-Planning* dan *E-Budgeting* di sektor pemerintah dapat mendorong manajer untuk menghasilkan laporan keuangan dengan transparansi yang lebih besar, yang dapat meningkatkan akuntabilitas publik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi alat ukur utama dalam menilai kinerja instansi publik. SAKIP didasarkan pada kerangka *New Public Management* (NPM) yang menekankan orientasi pada hasil, efisiensi, dan evaluasi kinerja secara sistematis (Hood, 1991). *E-Planning* dan *E-Budgeting*, secara singkat, adalah penggunaan teknologi informasi yang dipadukan dengan prinsip-prinsip NPM untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan berorientasi pada hasil dari perencanaan dan penganggaran di sektor publik (Haryani *et al.*, 2023). Penelitian ini diperlukan karena belum ada kajian yang komprehensif mengenai pengaruh *E-Planning* dan *E-Budgeting* terhadap akuntabilitas kinerja pada tingkat OPD di Kota Palembang, sehingga memberikan kebaruan dan kontribusi signifikan untuk pengembangan teori dan praktik pemerintahan daerah. Berdasarkan kajian literatur tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

2.1 Pengaruh E-Planning Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada OPD Kota Palembang

Hasil penelitian Gamayuni dan Hendrawaty (2022) menunjukkan bahwa *E-Planning* terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Zalfa (2023), yang membuktikan bahwa *E-Planning* signifikan meningkatkan transparansi keuangan. Penelitian Lastri (2019) juga mengungkapkan bahwa *E-Planning* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas SAKIP. Oleh karena itu, penerapan *E-Planning* berpengaruh terhadap akuntabilitas. H1: *E-Planning* berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada OPD Kota Palembang.

2.2 Pengaruh E-Budgeting Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada OPD Kota Palembang

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pengaruh implementasi *E-Budgeting* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Putririnda (2020) menunjukkan bahwa implementasi *E-Budgeting* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Surabaya. Sejalan dengan penelitian Andhayani (2023), *E-Budgeting* mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah secara keseluruhan. H2: *E-Budgeting* berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada OPD Kota Palembang.

RESEARCH ARTICLE

2.3 Pengaruh E-Planning dan E-Budgeting Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada OPD Kota Palembang

E-Planning menyediakan perencanaan kinerja yang terintegrasi dan transparan, sehingga mampu meningkatkan transparansi dan akurasi target kinerja. Selanjutnya, *E-Budgeting* menghubungkan anggaran dengan rencana kinerja secara elektronik, yang pada akhirnya memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan akuntabel. Kedua komponen ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien. *E-Planning* dan *E-Budgeting* menyediakan data dan proses yang terstruktur dan transparan. H3: *E-Planning* dan *E-Budgeting* berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada OPD Kota Palembang.

3. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Untuk mengukur tingkat penerapan *E-Planning* dan *E-Budgeting*, digunakan metode *content analysis*, yaitu teknik untuk menganalisis dan memahami teks, kemudian menggolongkannya sesuai dengan indikator penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan teknik *total sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian tanpa ada yang dikecualikan. Sampel yang digunakan adalah laporan LAKIP yang bersumber dari website *E-Sakip* Kota Palembang, yang mencakup 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang. Pemilihan objek penelitian diperoleh dari data dan informasi mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Skor SAKIP yang terdapat pada OPD Kota Palembang untuk periode tahun 2022-2024.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil

Table 2. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-Planning	81	.00	8.00	5.6667	1.90394
E-Budgeting	81	.00	8.00	4.8889	2.48998
SAKIP	81	56.00	85.75	74.0591	6.40673
Valid N (listwise)	81				

Berdasarkan tabel 2 diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 81 data sampel. Hasil statistik deskriptif menunjukkan variabel *E-Planning* memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 8,00 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 5,6667 dan standar deviasi 1,90394. Nilai rata-rata yang cukup tinggi menunjukkan bahwa implementasi *E-Planning* pada OPD Kota Palembang sudah cukup baik. Standar deviasi yang relatif kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata mengindikasikan bahwa data *E-Planning* cukup homogen atau tidak terlalu bervariasi antar OPD. Kemudian untuk variabel *E-Budgeting* menunjukkan nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum 8,00 dengan nilai rata-rata 4,8889 dan standar deviasi 2,48998. Nilai rata-rata *E-Budgeting* lebih rendah dibandingkan dengan *E-Planning*, yang mengindikasikan bahwa implementasi *E-Budgeting* masih perlu ditingkatkan. Standar deviasi yang lebih besar menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup tinggi dalam implementasi *E-Budgeting* antar OPD di Kota Palembang. Variabel SAKIP sebagai variabel dependen memiliki rentang nilai antara 56,00 hingga 85,75 dengan nilai rata-rata 74,0591 dan standar deviasi 6,40673. Nilai rata-rata yang berada pada kategori cukup baik menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja

RESEARCH ARTICLE

pemerintah daerah melalui SAKIP pada OPD Kota Palembang sudah mencapai level yang memadai, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan.

Tabel 3. Uji Normalitas (Sesudah Transform)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.99917671
Most Extreme Differences	Absolute	.144
	Positive	.104
	Negative	-.144
	Test Statistic	.144
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.000c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.067d
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.060
	Upper Bound	.073

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

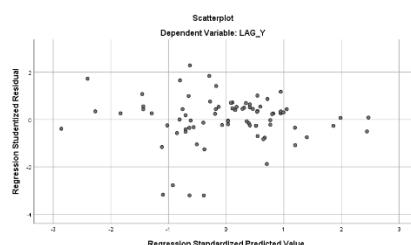
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 92208573.

Setelah dilakukan transformasi akar kuadrat (sqrt), hasil uji normalitas menunjukkan perbaikan dengan nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,067, yang lebih besar dari 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa setelah transformasi, data tidak lagi menunjukkan penyimpangan yang signifikan dari distribusi normal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga analisis regresi dapat dilanjutkan.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	.932	1.073
	.932	1.073

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai Tolerance untuk kedua variabel independen adalah 0,932 ($> 0,10$) dan nilai VIF sebesar 1,073 (< 10). Kedua nilai ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas yang signifikan antar variabel independen. Dengan kata lain, variabel *E-Planning* dan *E-Budgeting* tidak saling berkorelasi secara sempurna, sehingga kedua variabel tersebut dapat digunakan secara bersamaan dalam model regresi tanpa masalah multikolinearitas.



Gambar 1. Grafik Scatterplot

RESEARCH ARTICLE

Plot residual menunjukkan bahwa model regresi untuk variabel LAG_Y memiliki kualitas yang memadai. Sebaran titik-titik residual yang acak di sekitar garis nol mengindikasikan bahwa asumsi linearitas terpenuhi. Sebagian besar residual berada dalam rentang ± 2 standar deviasi, yang menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati normal. Meskipun secara visual varians residual tampak relatif konstan sepanjang rentang nilai prediksi, untuk memastikan tidak adanya pelanggaran asumsi homoskedastisitas, perlu dilakukan pengujian lebih lanjut menggunakan uji Glejser. Pengujian ini penting karena evaluasi visual dari plot residual terkadang bisa memberikan kesimpulan yang subjektif, terutama ketika terdapat beberapa outlier yang teridentifikasi pada bagian atas grafik dengan nilai residual yang lebih besar dari 2.

Tabel 5. Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.760	2.946		1.616	.110
SQRT_LAG_X1	.394	1.101	.040	.357	.722
SQRT_LAG_X2	-10.761	4.296	-.282	-2.505	.014

Berdasarkan Tabel 5, hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan nilai signifikansi untuk SQRT_LAG_X1 sebesar 0,722 ($> 0,05$) dan SQRT_LAG_X2 sebesar 0,014 ($< 0,05$). Hasil ini mengindikasikan adanya heteroskedastisitas pada variabel X2. Namun, mengingat bahwa salah satu variabel masih memenuhi asumsi homoskedastisitas, model regresi tetap dapat digunakan, dengan catatan bahwa interpretasi hasil harus dilakukan dengan hati-hati, terutama terkait dengan variabel yang menunjukkan pelanggaran asumsi homoskedastisitas.

Tabel 6. Uji Autokorelasi (Metode Cochrane-Orcutt)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.366a	.134	.111	5.06368	1.977

Setelah dilakukan penyembuhan dengan metode Cochrane-Orcutt, nilai Durbin-Watson menjadi 1,977, yang berada dalam rentang $d_U < DW < 4 - d_U$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model telah memenuhi asumsi tidak adanya korelasi antar residual. Penanganan masalah autokorelasi ini sangat penting, karena adanya autokorelasi dapat menyebabkan estimasi varian yang tidak efisien dan uji statistik yang tidak valid. Dengan terpenuhinya asumsi tidak ada autokorelasi, hasil analisis regresi menjadi lebih reliable dan dapat dipercaya.

Tabel 7. Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	38.881	4.283	
SQRT_LAG_X1	-3.724	1.601	-.256
SQRT_LAG_X2	11.577	6.246	.204

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda setelah transformasi dan penyembuhan, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{SAKIP} = 38,881 - 3,724 E\text{-Planning} + 11,577 E\text{-Budgeting}$$

RESEARCH ARTICLE

Persamaan regresi tersebut memiliki arti sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 38,881 menunjukkan bahwa jika tidak ada implementasi *E-Planning* dan *E-Budgeting*, maka nilai SAKIP akan sebesar 38,881.
- 2) Koefisien *E-Planning* sebesar -3,724 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada akar kuadrat *E-Planning* akan menurunkan SAKIP sebesar 3,724 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.
- 3) Koefisien *E-Budgeting* sebesar 11,577 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada akar kuadrat *E-Budgeting* akan meningkatkan SAKIP sebesar 11,577 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan.

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.366a	.134	.111	5.06368	1.977

Berdasarkan Tabel di atas, nilai R Square sebesar 13,4% menunjukkan bahwa variabel *E-Planning* dan *E-Budgeting* secara bersama-sama mampu menjelaskan 13,4% variasi pada SAKIP. Sementara itu, sisanya sebesar 86,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Tabel 9. Uji Parsial (uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	38.881	4.283	9.079	.000
	SQRT_LAG_X1	-3.724	1.601	-2.326	.023
	SQRT_LAG_X2	11.577	6.246	.204	.1854
					.068

Dari persamaan pada Tabel 9, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Hasil uji t untuk variabel SQRT_LAG_X1 (*E-Planning*) menunjukkan nilai t hitung sebesar -2,326 dengan signifikansi 0,023 (< 0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa *E-Planning* berpengaruh signifikan terhadap SAKIP. Namun, arah pengaruhnya negatif, yang berbeda dengan hipotesis awal. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi *E-Planning*, dalam kondisi tertentu, dapat menurunkan nilai SAKIP. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kompleksitas sistem yang belum diimbangi dengan kapasitas SDM yang memadai.
- 2) Hasil uji t untuk variabel SQRT_LAG_X2 (*E-Budgeting*) menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,854 dengan signifikansi 0,068 (> 0,05). Ini menunjukkan bahwa *E-Budgeting* tidak berpengaruh signifikan terhadap SAKIP pada tingkat kepercayaan 95%. Meskipun arah pengaruhnya positif sesuai dengan hipotesis, pengaruhnya tidak signifikan secara statistik.

Tabel 10. Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	305.100	2	152.550	5.949
	Residual	1974.350	77	25.641	
	Total	2279.450	79		

Berdasarkan Tabel 10, hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 5,949 dengan signifikansi 0,004 (< 0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa, secara simultan, variabel *E-Planning* dan *E-Budgeting* berpengaruh signifikan terhadap SAKIP. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak dan dapat menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

RESEARCH ARTICLE

4.2 Pembahasan

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel E-Planning berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, dengan nilai signifikansi sebesar 0,023 ($p < 0,05$). Namun demikian, arah koefisien regresinya adalah negatif, yakni sebesar -3,724. Artinya, semakin tinggi implementasi E-Planning, justru cenderung menurunkan nilai akuntabilitas kinerja pada OPD Kota Palembang. Dalam penelitian ini, ketika penggunaan atau penerapan sistem E-Planning (perencanaan berbasis elektronik) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang semakin meningkat, nilai atau skor akuntabilitas kinerja justru menurun. Temuan ini bertentangan dengan sejumlah penelitian sebelumnya, seperti oleh Gamayuni & Hendrawaty (2022) yang menyatakan bahwa E-Planning berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas SAKIP di Indonesia. Penelitian Zalfa (2023) dan Lastri (2019) juga menunjukkan bahwa E-Planning meningkatkan transparansi dan kualitas perencanaan kinerja. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Afrianto *et al.* (2024) yang menemukan adanya hubungan negatif yang signifikan antara variabel perencanaan dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Proses penyusunan perencanaan kinerja serta anggaran berbasis kinerja yang tidak berjalan optimal sebagaimana mestinya menyebabkan perencanaan tersebut memiliki dampak yang kuat terhadap peningkatan atau penurunan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Hasil uji t menunjukkan bahwa pengaruh E-Budgeting terhadap akuntabilitas kinerja tidak signifikan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,068 ($p > 0,05$). Meskipun koefisien regresi menunjukkan arah positif (11,577), secara statistik hubungan tersebut belum cukup kuat. Hasil ini berbeda dengan penelitian Putririnda (2020) yang menemukan bahwa E-Budgeting di Kota Surabaya berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian Padmasari (2024) juga menyatakan bahwa E-Budgeting meningkatkan transparansi dan kinerja pengelolaan anggaran daerah. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Novendri (2024) di Kabupaten Bulungan, yang menunjukkan bahwa E-Budgeting tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena pelaksanaannya yang belum matang, kurangnya SDM, dan sistem yang belum sepenuhnya digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan, E-Planning dan E-Budgeting memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja OPD Kota Palembang, dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, meskipun secara parsial hanya E-Planning yang signifikan (namun negatif), dan E-Budgeting tidak signifikan, kedua variabel tersebut tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan atau penurunan akuntabilitas kinerja ketika dilihat secara bersama-sama. Interpretasi hasil ini dapat dijelaskan melalui teori Stewardship. Dalam teori ini, pejabat publik (steward) dianggap memiliki itikad baik untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan loyalitas terhadap kepentingan publik. Ketika sistem perencanaan dan penganggaran terintegrasi secara digital, seperti dalam E-Planning dan E-Budgeting, pejabat publik memiliki alat bantu yang lebih objektif dan akuntabel dalam menyusun rencana, mengelola anggaran, serta melaporkan kinerja mereka.

5. Kesimpulan

Implementasi E-Planning berpengaruh secara signifikan, namun negatif, terhadap akuntabilitas kinerja pada OPD Kota Palembang. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesiapan sistem, keterbatasan SDM yang menguasai teknologi, atau tidak optimalnya integrasi dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang diharapkan. Sementara itu, implementasi E-Budgeting tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem E-Budgeting belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan akuntabilitas, karena pemanfaatannya masih terbatas pada aspek teknis penyusunan anggaran tanpa penguatan pada aspek evaluasi dan pengawasan anggaran yang terintegrasi. Secara simultan, kedua variabel independen, yaitu E-Planning dan E-Budgeting, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Meskipun pengaruh masing-masing variabel berbeda, hasil ini menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, sistem elektronik perencanaan dan penganggaran tetap memiliki peran penting dalam membentuk kualitas akuntabilitas instansi pemerintahan daerah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk

RESEARCH ARTICLE

menambahkan variabel lain, seperti kompetensi pegawai atau dukungan manajerial, sebagai faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

6. Referensi

- Afrianto, D., Sunardi, & Sisharini, N. (2024). Pengaruh perencanaan, transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui pengawasan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(3), 38–51.
- Andhayani, A. (2023). Sistem informasi pemerintahan daerah: e-Budgeting untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah daerah. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 4(2), 183–193. <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.005>.
- Apriliani, A. S., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Wibowo, H. (2023). Pengaruh E-Planning, E-Budgeting, dan E-Procurement Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 254–264. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1289>.
- Cahya'Azizah, A., Dirgantari, N., Winarni, D., Setyadi, E. J., & Wibowo, H. (2026). Pengaruh E-Simbada, E-Budgeting, dan E-Planning Terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(1), 380-394. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v9i1.2166>.
- Gamayuni, R. R., & Hendrawaty, E. (2022). *E-Planning, E-Budgeting and the quality of government institution performance accountability system in Indonesia*. *Talent Development & Excellence*, 11(1s), 218–225.
- Lastri, J. (2019). Pengaruh maturitas SPIP, kapabilitas APIP, serta implementasi E-Planning E-Budgeting terhadap kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Tesis Universitas Lampung*. <http://digilib.unila.ac.id/54966/0Ahttp://digilib.unila.ac.id/54966/3/tesis%20tanpa%20bab%20pembahasan.pdf>
- Maharani, D. D. (2020). Penerapan E-Planning sebagai bentuk sistem perencanaan daerah berbasis teknologi di Kabupaten Demak. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Novendri, I. (2024). Pengaruh E-Budgeting, pengendalian internal, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di organisasi perangkat daerah Kabupaten Bulungan. 12(1), 1–10.
- Padmasari, O. A. (2024). Pengaruh implementasi e-planning, e-budgeting, dan e-procurement terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Lampung Utara. 01031182025020.
- Putri, G. A. W. (2024). Pelaksanaan E-Budgeting Dalam Penyusunan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi*, 2(1), 55–62.
- Putririnda, V. I. (2020). Pengaruh implementasi E-Budgeting terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di Pemerintah Kota Surabaya. 2507(February), 1–9.

RESEARCH ARTICLE

Rahman, N. R. (2022). Pengaruh implementasi *E-Budgeting* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi.

Yulianti, M. (2025). *PENGARUH E-PLANNING DAN E-BUDGETING TERHADAP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTAPALEMBANG* (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya).

Zalfa, M. (2023). Efektivitas *E-Planning* dalam sinkronisasi dokumen rencana kerja dan dokumen pelaksana anggaran di Bappeda Litbang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. 1–23.